

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan publik di era digital saat ini menekankan bahwa pentingnya pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan publik merupakan instrumen yang penting untuk mengatur berbagai aspek dalam pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah. Kebijakan publik ini mencakup berbagai peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengarahkan pengelolaan keuangan yang efektif dan transparan. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) merupakan salah satu langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Kebijakan publik yang mengatur penggunaan SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan upaya pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung proses pengelolaan keuangan yang lebih efektif dan efisien. Salah satu peraturan yang mewajibkan penggunaan SIPD adalah Permendagri No. 70 Tahun 2019. Permendagri tersebut menegaskan bahwa seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) termasuk Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Situbondo wajib menggunakan aplikasi SIPD sebagai pengganti aplikasi SIMDA. Sebagaimana dijelaskan dalam Permendagri No. 70 Tahun 2019, SIPD adalah sistem informasi yang mencakup pengelolaan Informasi Pembangunan Daerah, Informasi Keuangan Daerah, dan Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya yang saling terkait untuk digunakan dalam pelaksanaan pembangunan daerah. SIPD juga berfungsi sebagai jejaring dalam pengumpulan data secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi, sebagai bantuan perencanaan program dan kegiatan, serta evaluasi pembangunan daerah yang rasional, efektif dan efisien.

Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang diterapkan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Lebih lanjut, penerapan sistem informasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan

akuntabilitas dan integritas dalam pengelolaan keuangan daerah, serta mendukung upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah secara efektif. Penilaian efektivitas ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai sejauh mana penerapan sistem informasi pemerintah daerah dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Untuk mengatur pengelolaan keuangan dan aset daerah saat ini yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Situbondo menjadi salah satu instansi yang menggunakan aplikasi SIPD. Dalam kantor BKAD ini terdapat lima bidang yang terdiri dari bidang anggaran, sekertariat, perbendaharaan, akuntansi dan aset. Akan tetapi yang menggunakan aplikasi SIPD hanyalah tiga bidang saja. Pada bidang pertama yaitu bidang anggaran yang mulai menggunakan aplikasi SIPD pada tahun 2021, dan pada dua bidang lainnya yaitu bidang perbendaharaan dan akuntansi mulai menggunakan aplikasi SIPD pada tahun 2022-2024. Penerapan aplikasi SIPD ini di Kabupaten Situbondo dinilai belum efektif dalam oprasionalnya, sehingga berdampak pada aktivitas pelaporan keuangannya.

Permasalahan yang terkait penerapan SIPD di BKAD Kabupaten Situbondo anatara lain yaitu kendala yang dihadapi pada bidang anggaran yaitu dalam modul pelaporannya sering kali tidak terlihat dan keseluruhan pelaporannya juga sering kali tidak berjalan. Di sisi lain, kendala yang dialami bidang perbendaharaan yaitu aplikasi SIPD belum terintegrasi dengan CMS Bank Jatim dan juga terdapat kendala pada sistem pengaplikasiannya juga sering mengalami eror. Sedangkan kendala di bidang bagian akuntansi yaitu masih terdapat beberapa fitur aplikasi yang masih belum tersedia pada akuntansinya. Terlebih lagi, pada proses penyajian informasi keuangan daerah, khususnya di bagian perbendaharaan, anggaran dan akuntansi masih belum optimal dalam penerapan SIPD tersebut.

Beberapa penelitian terkait SIPD telah dilakukan. Namun, menurut Inzay et al. (2022) terdapat perbedaan hasil mengenai penerapan SIPD, mereka menyatakan bahwa implementasi aplikasi SIPD dalam bentuk website dapat memudahkan dan mempercepat pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan publik, namun

pelaksanaan program ini sangatlah kompleks dan memerlukan komunikasi, upaya dan kerjasama dari seluruh instansi pemerintah daerah. Selain itu, pada penelitian Nasution dan M.Si (2021) menyatakan bahwa terdapat juga permasalahan pada jaringan SIPD yang memerlukan menu input dan penyediaan yang sering rawan kesalahan dalam pembuatan anggaran kas dan proses lainnya. Hal ini juga berbeda dengan penelitian dari Alfani dan Nasution (2022) yang menyatakan bahwa pengguna sistem SIPD masih belum memahami dengan jelas penginputannya, sehingga memerlukan pengawasan lebih.

Untuk mengimplementasi SIPD tersebut di Kabupaten Situbondo perlu dengan keseriusan untuk mendapatkan penerapan yang sesuai dengan keinginan pemerintah pusat dengan menggunakan model implementasi yang ada. Model yang digunakan dalam pendekatan suatu implementasi kebijakan yang diciptakan oleh Edward III *dalam* Widodo (2022) yang disebut dengan A Model of Policy Implementation pada tahun 1980. Dalam pandangan Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yakni Komunikasi (communication), sumber daya (resource), sikap atau disposisi (dispositions), dan struktur birokrasi (bureaucratic structure).

Berdasarkan latar belakang masalah diatas peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas , maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah pada BKAD Kabupaten Situbondo?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah pada BKAD Kabupaten Situbondo

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang berkeperntingan antara lain:

1) Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat memberikan pengalaman dan pemahaman yang mendalam tentang penerapan sistem informasi pemerintah daerah, memperkaya pengetahuan dan keterampilan dalam bidang tersebut, serta meningkatkan kemampuan analisis dan evaluasi.

2) Bagi BKAD

Hasil penelitian ini akan memberikan wawasan yang berharga dalam mengevaluasi efektivitas sistem informasi yang telah diterapkan, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan peningkatan yang dapat dilakukan guna meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah.

3) Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya dan bisa dikembangkan lagi menjadi tahap yang lebih sempurna.